

Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN

Policy Brief

No. 02/Maret/2021

Dr. dr. Hanevi Djasri MARS, FISQua

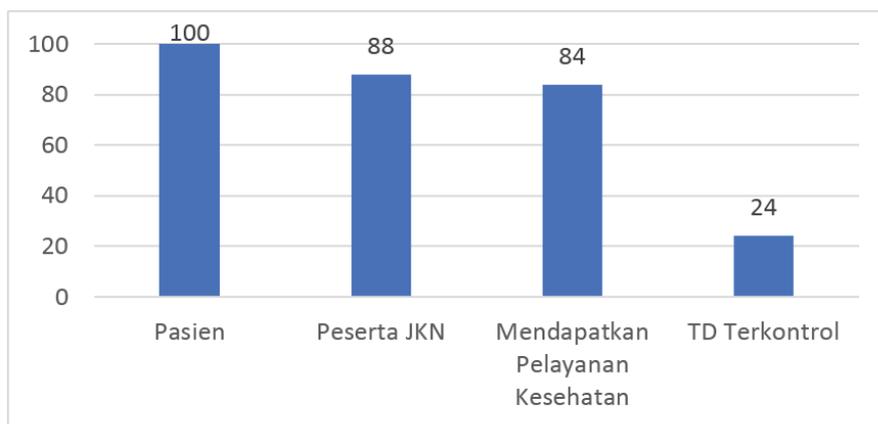
Ringkasan Eksekutif

Pencapaian cakupan efektif belum mendapatkan perhatian besar dari BPJS Kesehatan. Selama enam tahun hanya cakupan kepesertaan dan cakupan pelayanan yang menjadi prioritas untuk dicapai oleh BPJS Kesehatan maupun pemangku kepentingan lainnya. Direksi baru BPJS Kesehatan diharapkan melakukan pengukuran dan peningkatan cakupan efektif karena cakupan efektif yang rendah memiliki pengaruh yang besar pada peningkatan beban biaya JKN.

Rumusan Masalah

Lebih dari enam tahun adanya BPJS Kesehatan, pelaporan aspek kinerja mutu pelayanan kesehatan tentang cakupan efektif belum pernah disampaikan oleh para direksi. Saat ini, bentuk kinerja BPJS Kesehatan yang sering kali dilaporkan hanya mengenai aspek jumlah kepesertaan, jumlah iuran yang dihimpun dan jumlah pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan, hingga jumlah defisit dan baru-baru ini jumlah surplus. Sementara, mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk cakupan efektif¹ tidak diukur, hanya sekedar mengukur kepuasan kepesertaan dan kepuasan provider.

Sebagaimana hasil penelitian² pada tahun 2019 di salah satu kabupaten Pulau Jawa, menunjukkan bahwa dari hampir 400 penderita darah tinggi (*hipertensi*) di lebih dari 60 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), 87% di antaranya telah menjadi peserta JKN (cakupan kepesertaan) dan 84% telah berobat (cakupan pelayanan). Hal tersebut telah menggambarkan bahwa cakupan kepesertaan dan cakupan pelayanan sudah baik. Akan tetapi, untuk cakupan efektif hanya mencapai 24% yaitu penderita yang tekanan darahnya terkontrol setelah mendapatkan pelayanan kesehatan (lihat gambar 1).



Gambar 1. Studi Kasus Cakupan Efektif Hipertensi (Sumber: Djasri, 2019)

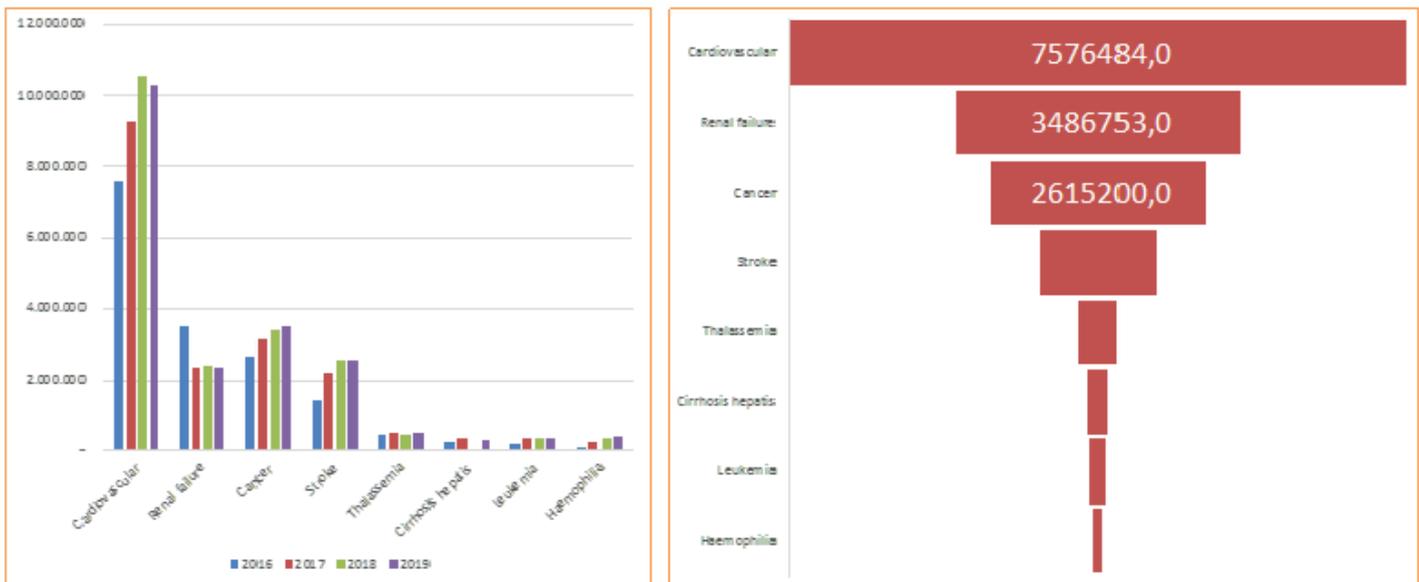
Cakupan efektif tersebut tergolong rendah untuk kabupaten yang memiliki banyak akses ke Fayankes. Bila dibandingkan dengan penelitian lain, maka seharusnya cakupan efektif tersebut minimal dapat mencapai 42% (setengah dari penderita hipertensi yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan).

Apa yang terjadi jika cakupan efektif tidak tercapai?

Hampir seluruh negara dan para peneliti sepakat bahwa cakupan efektif tatalaksana hipertensi (berupa terkontrolnya tekanan darah) merupakan bentuk dari gambaran baik buruknya pelayanan kesehatan yang diterima penderita. Selain itu, tekanan darah yang terkontrol dapat mencegah penderita hipertensi mengalami komplikasi atau penyakit lain seperti stroke, jantung dan gagal ginjal yang kemudian secara langsung berakibat kepada beban dan biaya perawatan kesehatan yang dapat melambung tinggi (lihat gambar 2).

¹ Cakupan efektif dalam JKN adalah ukuran seberapa banyak penduduk di Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, dengan mutu yang baik.

² Hanevi Djasri, (2019), Cakupan efektif tatalaksana hipertensi dalam JKN di Kabupaten Sleman, FKKMK UGM.



Gambar 2. Delapan Biaya Penyakit Katastropik 2014 – 2019
Sumber: BPJS Kesehatan, 2020.

Pencapaian cakupan efektif tidak hanya berlaku pada hipertensi, tetapi juga pada penyakit lainnya, terutama untuk berbagai kondisi atau penyakit prioritas nasional, baik penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, HIV, dan termasuk saat ini Covid-19; penyakit tidak menular seperti kencing manis, jantung, ginjal, dan kanker; serta penyakit terkait kesehatan ibu dan anak, termasuk stunting.

Tidak tercapainya cakupan efektif tidak hanya meningkatkan pembiayaan JKN namun juga menunjukkan tidak efektifnya pelayanan kesehatan yang diberikan dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan, bahkan dapat membahayakan masyarakat. Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia, hampir sepuluh tahun lalu, sudah memperingatkan seluruh negara, bahwa tidak ada gunanya penduduk memiliki jaminan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan yang mereka terima tidak bermutu, atau bahkan membahayakan.

Usulan untuk menciptakan cakupan efektif

Melakukan pengukuran cakupan efektif dan menjadikannya sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan JKN merupakan hal yang esensial dalam memastikan cita-cita cakupan kesehatan semesta (UHC) dapat tercapai, yaitu memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh penduduk tanpa hambatan finansial.

Pengukuran cakupan efektif diusulkan untuk dapat dilakukan dengan cara:

1. Membangun komitmen bersama: bahwa cakupan efektif penting diukur dan ditingkatkan. Komitmen dibangun antara pihak pemerintah yaitu kementerian kesehatan, BPJS Kesehatan, kementerian dalam negeri, dan pemerintah daerah, dengan para pengelola Fasyankes, organisasi profesi, serta perwakilan pasien, serta wakil rakyat.
2. Menetapkan sumber data: Data harus berasal dari gabungan data JKN, data pelayanan di Fasyankes, dan data dari berbagai survei seperti Survei Kesehatan Nasional. Hasil analisa dari seluruh data tersebut menjadi dasar untuk penyusunan rencana peningkatan cakupan efektif, tingkat nasional maupun daerah.

Informasi lebih lanjut:

Tri Muhartini

+6289693387139

Trimuhartini27@gmail.com